

Pengetahuan Pegawai terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Perkembangan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi

Hurian Kamela

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka,
Tangerang Selatan, Indonesia

Email: hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of employee knowledge on local government financial performance, with the development of information technology as a moderating variable. The research background is based on the importance of human resource competencies in managing public finances in an accountable and transparent manner, especially in the era of digitalization of government administration. This study employs a quantitative approach, utilizing a survey method among local government employees in several administrative regions. Data were collected through questionnaires and analyzed using moderation regression techniques to test the relationship between variables. The results showed that employee knowledge has a positive and significant effect on local government financial performance. Additionally, the development of information technology has been proven to strengthen relationships, as the use of financial information systems enables employees to manage and report finances more effectively and efficiently. These findings suggest that enhancing the quality of human resources requires the development of adequate digital infrastructure, enabling optimal improvement in local financial performance. This research provides important implications for policymakers in designing training strategies and digitizing public sector financial management.

Keywords: *Employee Knowledge, Financial Performance, Local Government, Information Technology, Moderation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pegawai terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan perkembangan teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola keuangan publik secara akuntabel dan transparan, terutama dalam era digitalisasi administrasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap pegawai pemerintah daerah di beberapa wilayah administratif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik regresi moderasi untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi terbukti memperkuat hubungan tersebut, penggunaan sistem informasi keuangan membantu pegawai dalam mengelola dan melaporkan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas SDM perlu didukung oleh pengembangan infrastruktur digital yang memadai agar kinerja keuangan daerah dapat meningkat secara optimal. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pelatihan dan digitalisasi pengelolaan keuangan sektor publik.

Kata Kunci: Pengetahuan Pegawai, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Teknologi Informasi, Moderasi.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pengelolaan keuangan menjadi alat utama untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran publik dalam konteks otonomi daerah. Pengelolaan keuangan yang berhasil bukan hanya kepada sistem yang digunakan, namun pegawai internalnya yang harus yang memahami prosedur dan dasar pengelolaan keuangan lokal. Pengetahuan pegawai tentang keuangan daerah menjadi salah satu komponen penting yang menentukan seberapa efektif kegiatan operasionalnya. Pegawai yang memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, sistem anggaran, dan pelaporan keuangan daerah cenderung membantu menciptakan tata kelola yang lebih baik. Sebaliknya, kekurangan pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan anggaran, keterlambatan pelaporan, atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana publik. Teknologi informasi menjadi alat strategis untuk mendukung pengembangan sistem keuangan daerah yang lebih canggih dan transparan di tengah tuntutan yang semakin meningkat untuk akuntabilitas publik. Teknologi informasi memberikan perubahan yang signifikan dari perilaku pegawai untuk mampu beradaptasi kedepannya [1]. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi kinerja ini adalah pengetahuan pegawai, terutama dalam memahami regulasi keuangan, sistem akuntansi pemerintah, serta penggunaan perangkat dan sistem keuangan daerah berbasis digital. Meskipun banyak studi telah menyoroti pentingnya kompetensi SDM dan adopsi teknologi informasi, namun sedikit yang secara eksplisit mengkaji interaksi antara pengetahuan pegawai dan perkembangan teknologi informasi dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini: tidak hanya melihat dua variabel secara terpisah, tetapi menguji peran moderasi teknologi informasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan pegawai terhadap kinerja keuangan. Hal ini penting untuk menjawab tantangan nyata di lapangan, di mana digitalisasi tidak serta-merta meningkatkan kinerja jika tidak didukung oleh kapasitas SDM yang memadai. Relevansinya adalah penelitian sebelumnya memberikan landasan penting, namun juga membuka ruang untuk eksplorasi lebih. Sulistiyani dan Rosidah (2019) menemukan bahwa pengetahuan pegawai berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah, namun tidak menguji pengaruh tidak langsung atau peran teknologi [12]. Ramdhani et al. (2021) menekankan pentingnya sistem informasi keuangan daerah, tetapi lebih menekankan aspek sistem dan tidak memperhatikan kesiapan SDM secara pengetahuan [10]. Rahmawati dan Widodo (2020) menyebutkan bahwa kompetensi dan literasi digital pegawai harus berjalan seiring, tetapi tidak menguji peran teknologi sebagai variabel pemoderasi [10]. State of the art dari penelitian ini yaitu implementasi digitalisasi keuangan daerah melalui SIPD, e-budgeting, e-planning, dan e-audit, (2) Pentingnya kapasitas SDM keuangan daerah dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual; (3) Evaluasi terhadap efisiensi belanja dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Namun, masih sedikit studi yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dengan desain moderasi antara pengetahuan dan teknologi informasi. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan model interaktif yang menjelaskan bahwa efek positif dari pengetahuan pegawai terhadap kinerja keuangan tidak bersifat linier atau mutlak, tetapi dipengaruhi oleh tingkat kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur manajemen publik dan tata kelola keuangan daerah dengan menambahkan dimensi teknologi sebagai pemoderasi, suatu pendekatan yang masih jarang diangkat di konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Menurut A. Putri dan Hartono (2025), pegawai yang memahami prosedur pengelolaan keuangan daerah cenderung mampu mendorong efisiensi penggunaan anggaran dan meminimalisir kesalahan pelaporan [2]. Selain itu, riset oleh M. Sari dan Kurniawan (2025) menunjukkan bahwa penguasaan pegawai terhadap sistem akuntansi pemerintahan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data keuangan yang akurat. Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi pola kerja birokrasi, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah [8]. Sistem informasi keuangan berbasis digital telah diimplementasikan untuk mempercepat proses pencatatan dan pelaporan anggaran. Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologinya, tetapi juga pada kesiapan SDM penggunaannya. Menurut Fadli dan Arifin (2025), keterbatasan pengetahuan pegawai terhadap sistem berbasis digital menyebabkan rendahnya optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung kinerja keuangan [7]. Dalam hal ini, teknologi informasi berpotensi menjadi faktor yang memperkuat atau bahkan menghambat hubungan antara pengetahuan pegawai dan hasil kinerja keuangan (Rahmat & Dewi, 2025) [13].

Beberapa studi di Indonesia telah mengulas secara terpisah tentang pentingnya pengetahuan SDM dan teknologi dalam birokrasi publik. Namun, belum banyak yang menguji bagaimana teknologi informasi berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara pengetahuan pegawai dan kinerja keuangan. Menurut hasil kajian oleh Andini dan Permana (2025), interaksi antara variabel SDM dan teknologi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peningkatan kinerja sektor publik [1]. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan tersebut dan memberikan pemahaman baru tentang peran strategis digitalisasi dalam meningkatkan kualitas keuangan pemerintah daerah (Nugraha & Wulandari, 2025) [13]. Rumusan penelitian yaitu (1) Apakah pengetahuan pegawai berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?, (2) Apakah pengetahuan pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan perkembangan teknologi informasi sebagai pemoderasi?.

Berdasarkan pengelolaan keuangan daerah, integrasi data, percepatan proses, dan peningkatan akurasi dan keamanan dimungkinkan oleh teknologi informasi. Hal yang efektif untuk sistem keuangan yaitu melaksanakan penerapan kegiatan sistem secara digital seperti budgeting, audit, dan laporan elektronik. Namun, penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan yang efektif memerlukan pegawai yang siap untuk perubahan, termasuk pengetahuan dan keterampilan dalam pengoperasian sistem digital. Berdasarkan penelitian di Denpasar, hal ini terbukti memberikan peningkatan kualitas laporan keuangan di wilayah, jika dapat dikontrol dengan baik [8]. Artinya, meskipun pegawai memiliki pengetahuan yang memadai, penguasaan teknologi belum tentu dapat dilakukan oleh pegawai dengan baik. Sebaliknya, pengetahuan pegawai dapat diperkuat oleh kemajuan teknologi informasi yang mudah diakses dan luas. Ini akan memungkinkan proses perencanaan dan pelaporan keuangan dilakukan secara efisien dan akurat. Teknologi ini juga memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih real-time, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.

Realisasi anggaran, efektivitas belanja, akurasi pelaporan, dan kepatuhan terhadap undang-undang adalah beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Indikator-indikator ini tidak hanya menunjukkan seberapa baik dana publik dikelola, tetapi juga menunjukkan seberapa besar tanggungjawab yang ada di pemerintah daerah. Perlunya memahami elemen teknis dan regulatif keuangan sangat penting bagi pegawai. Banyak masalah yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah Indonesia, terutama dalam hal kualitas SDM dan digitalisasi yang semakin berkembang. Beberapa daerah mengalami keterbatasan dalam hal pelatihan pegawai, akses ke teknologi informasi, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan sistem digital, yang semuanya menyebabkan kinerja keuangan yang buruk, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan publik. Pemerintah daerah harus melaksanakan keberlanjutan jangka panjang, khususnya untuk sumber daya manusia [4].

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana pengetahuan pegawai dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan seberapa kuat hubungannya dengan kemajuan teknologi informasi. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai yang lebih berfokus pada teknologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memperkuat tata kelola keuangan daerah menjadi lebih jelas, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya administratif, tetapi juga dapat menghasilkan nilai tambahan untuk pembangunan daerah dan kepercayaan publik. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pengetahuan pegawai memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki bagaimana kemajuan teknologi informasi memainkan peran moderasi dalam hubungan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang seberapa penting penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

1.1 *Teori Sumber Daya (Resource-Based View/RBV)*

Teori ini merupakan pendekatan ilmu manajemen strategis yang menekankan bahwa keunggulan dan kinerja suatu organisasi bergantung pada seberapa baik mereka mengelola sumber daya internalnya. Aset berwujud dan tidak berwujud, seperti keahlian karyawan, budaya organisasi, sistem teknologi, dan pengetahuan, termasuk dalam kategori sumber daya yang dimaksud. Penelitian sebelumnya mengenai pemerintah daerah juga menggunakan RBV sebagai salah satu teori yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk SDM di lingkup pemerintah [9]. Pengetahuan pegawai sebagai modal intelektual adalah salah satu sumber daya penting dalam sektor publik yang dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini

untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan pegawai dapat menjadi komponen strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Dengan bantuan sumber daya teknologi informasi, pengetahuan pegawai akan menjadi lebih optimal karena dapat membantu pegawai mengelola, menganalisis, dan menyajikan data keuangan secara akurat dan cepat. Ini memungkinkan pemerintah daerah mencapai kinerja keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip

1.2 *Pengetahuan Pegawai*

Tingkat pemahaman, kemampuan, dan keterampilan seseorang dalam mengelola elemen keuangan daerah secara efektif dan efisien disebut pengetahuan pegawai. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek, seperti penguasaan terhadap regulasi keuangan, standar akuntansi pemerintahan, mekanisme penganggaran, dan prosedur pelaporan dan evaluasi keuangan publik. Penguatan pemahaman di organisasi pemerintah diharapkan menjadikan pegawai lebih bisa menghadapi perubahan pada lingkungan saat ini [11]. Pengetahuan yang memadai memungkinkan pegawai menjalankan tugas administratif dan teknis secara efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kualitas pelaksanaan fungsi keuangan daerah dipengaruhi oleh pengetahuan pegawai juga. Pegawai yang memahami prosedur keuangan secara menyeluruh dapat membuat perencanaan anggaran yang masuk akal, memantau pekerjaan dan menyusun pelaporan keuangan secara sesuai [6]. Ini akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan membantu pencapaian target program pembangunan, kepatuhan terhadap peraturan, dan penggunaan anggaran yang efisien. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan pegawai merupakan indikator penting untuk mengetahui seberapa siap perusahaan pemerintah untuk mengelola keuangan publik. Pegawai harus tahu bagaimana menggunakan sistem keuangan berbasis digital seiring kemajuan teknologi informasi, bukan hanya hal-hal manual. Kemampuan teknis tambahan diperlukan untuk digitalisasi proses keuangan. Komitmen diperlukan bagi pegawai untuk mampu meningkatkan kemampuannya [7]. Ini termasuk mengelola aplikasi akuntansi, menggunakan sistem informasi manajemen keuangan daerah, dan menganalisis data keuangan dengan bantuan perangkat lunak. Pengetahuan pegawai akan membantu melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi. Oleh karena itu, pengetahuan pegawai akan menjadi fondasi utama dalam mendukung transformasi digital yang sukses dalam tata kelola keuangan publik.

1.3 *Perkembangan Teknologi Informasi*

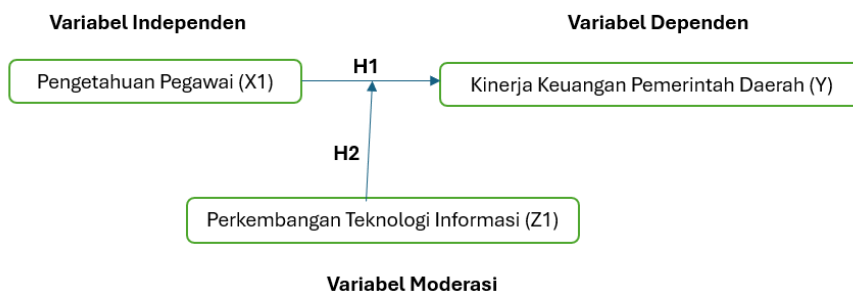
Berbagai platform seperti aplikasi akuntansi pemerintah, sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA), dan perangkat lunak pelaporan dan pengawasan anggaran adalah contoh kemajuan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dengan mengurangi jumlah pekerjaan manual yang dapat dimanipulasi atau salah. Seiring dengan digitalisasi administrasi publik, teknologi informasi telah menjadi alat penting untuk membantu pegawai, terutama dalam melakukan tugas keuangan. Pelacakan anggaran yang lebih baik, penyusunan laporan otomatis, dan akses ke data keuangan secara real-time dimungkinkan oleh teknologi informasi. Teknologi tidak hanya membantu teknis dalam situasi ini, tetapi juga mendorong budaya kerja untuk menjadi lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Sistem digital memberikan kecepatan dan ketepatan waktu. Teknologi informasi berfungsi sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini, memperkuat korelasi antara pengetahuan pegawai dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun karyawan memiliki pengetahuan yang luas, penggunaan teknologi informasi dapat membantu pegawai menggunakan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari dengan lebih baik [3]. Dengan kata lain, semakin berkembang dan terintegrasi sistem teknologi informasi, semakin besar pengaruh positif yang dimiliki pengetahuan karyawan terhadap hasil kinerja keuangan. Hal ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam pengembangan teknologi dan memberikan pelatihan yang memadai kepada pegawai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.

1.4 *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Hal ini menjelaskan perlunya pemerintah daerah melakukan sistem pengelolaan dana secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Beberapa indikator menunjukkan kinerja ini, seperti kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana kerja, efisiensi penggunaan belanja daerah, peningkatan PAD, dan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi pemerintahan. Penilaian kinerja keuangan sangat penting karena menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memenuhi kewajiban fiskalnya kepada masyarakat. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan tata kelola

anggaran yang baik dan keberlanjutan program pembangunan dan layanan publik yang lebih baik [7]. Pengelolaan keuangan yang efektif, pemerintah daerah akan lebih mudah mendapatkan opini WTP, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Akibatnya, kinerja keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pengukur kualitas layanan dan komitmen terhadap prinsip pemerintahan yang baik. Komitmen organisasi yang baik diharapkan membentuk kinerja yang efektif [5]. Pengetahuan karyawan dan pemanfaatan TI adalah dua komponen utama yang mempengaruhi kinerja keuangan penelitian ini. Pekerja yang berpengetahuan luas cenderung menyusun anggaran yang akurat, melakukan pelaporan yang tepat waktu, dan memastikan bahwa anggaran terpenuhi sesuai rencana. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini, diperlukan dukungan dari sistem TI yang canggih dan terintegrasi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pengetahuan pegawai.

1.5 Kerangka Penelitian



Hipotesis pertama (H1) dari penelitian ini adalah bahwa pengetahuan pegawai memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan baik. Artinya, tingkat pengetahuan pegawai terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan. Regulasi keuangan, anggaran, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas publik adalah semua yang harus diketahui oleh pegawai. Pegawai yang memahami elemen-elemen ini dengan baik akan mampu menyusun anggaran yang realistis, menggunakan anggaran secara efisien, dan melaporkan hasil secara akurat dan tepat waktu. Berdasarkan praktiknya, karyawan yang memahami kebijakan keuangan cenderung lebih sigap menghadapi perubahan kebijakan keuangan dan mampu meminimalkan kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah [1]. Selain itu, harus menyesuaikan strategi keuangan dengan kondisi fiskal daerah, menjaga kesesuaian antara realisasi dan rencana anggaran, dan berpartisipasi secara aktif dalam perbaikan sistem pengawasan internal, sehingga diharapkan lebih baik [2]. Hal ini tentunya berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini mendukung bahwa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pemerintahan daerah sangat penting. Untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok, upaya seperti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan peningkatan pengetahuan keuangan karyawan menjadi sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan penelitian bahwa pegawai memberikan pengaruh besar untuk kemajuan suatu organisasi [7]. Dengan kata lain, kinerja keuangan yang baik tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur; pengetahuan dan pemahaman pegawai juga sangat penting, sehingga:

H1: Pengetahuan Pegawai Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini adalah bahwa kemajuan teknologi informasi akan memoderasi pengetahuan pegawai dan berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika pegawai memiliki pengetahuan yang cukup dan didukung oleh sistem TI yang canggih dan terintegrasi, dampak positif dari pengetahuan pegawai terhadap kinerja keuangan menjadi lebih kuat dan besar. Dengan kemajuan teknologi informasi, transaksi keuangan dengan efektif. Misalnya Aplikasi e-budgeting, SIMDA, dan SIPKD adalah sistem informasi keuangan daerah yang membantu pegawai menginput data, membuat laporan, dan melakukan analisis anggaran dengan baik. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan pentingnya peran teknologi informasi sebagai pemoderasi untuk meningkatkan kualitas [10]. Hal ini memberikan efek bahwa dapat mengoptimalkan kinerjanya jika memiliki pemahaman yang baik tentang proses keuangan dan didukung dengan teknologi yang tepat. Dengan kata lain, pengetahuan pegawai tentang praktik pengelolaan keuangan lebih efektif dengan teknologi informasi. Teknologi informasi juga terbukti memoderasi secara efektif mengenai kesiapan pemerintah daerah kualitas [5]. Menurut hasil analisis penelitian ini, hubungan antara pengetahuan pegawai dan teknologi mempunyai pengaruh khususnya peningkatan kinerja keuangan. Dengan kata lain, teknologi informasi

memiliki potensi untuk meningkatkan efek pengetahuan terhadap hasil keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur digital dan pelatihan penggunaan sistem informasi keuangan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas karyawan, sehingga:

H2: Pengetahuan Pegawai Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Perkembangan Teknologi Informasi Sebagai Pemoderasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan kuantitatif secara survei. Populasi yaitu pegawai pada instansi pemerintah daerah. Teknik sampel berdasarkan purposive sampling, yaitu pegawai aktif pada instansi pemerintah daerah (baik pemerintah kota, kabupaten atau provinsi) Sumatera Selatan. Sampel sebanyak 65 orang. Waktu penelitian adalah Bulan Mei 2025 (1 Bulan). Pengukuran menggunakan skala likert (1-5). Justifikasi populasi bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya yang ada di pemerintahan. Pemilihan wilayah Sumatera Selatan didasarkan pada keragaman tingkat kinerja keuangan antar kabupaten/kota, serta tingkat adopsi teknologi informasi yang bervariasi, sehingga dapat memberikan gambaran empiris yang representatif terhadap hubungan antara pengetahuan, digitalisasi, dan kinerja keuangan daerah. Teknik purposive sampling digunakan karena tidak semua pegawai di pemerintah daerah memiliki pengetahuan atau tanggung jawab langsung dalam pengelolaan keuangan.

Kriteria inklusi yang ditetapkan yaitu: (1) pegawai dengan jabatan atau unit kerja terkait keuangan daerah; (2) memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang pengelolaan keuangan daerah; (3) bersedia mengisi kuesioner dengan sadar dan lengkap. Teknik ini memastikan bahwa responden benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Penentuan jumlah ini didasarkan pada pendekatan purposive dengan mempertimbangkan keterbatasan populasi sasaran, yaitu pegawai yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, jumlah tersebut memenuhi syarat minimum untuk analisis regresi moderasi, sehingga 65 responden dianggap cukup untuk menjaga kekuatan statistik (*statistical power*). Uji validitas dan reliabilitas bahwa instrumen penelitian diuji melalui validitas konstruk menggunakan nilai korelasi item-total, serta reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai korelasi > 0.30 (*valid*) dan nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel berada di atas 0.70, yang menunjukkan bahwa kuesioner reliabel (Nunnally, 1978). Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 26. Penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi untuk menguji apakah perkembangan teknologi informasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan pegawai (X) dan kinerja keuangan daerah (Y). Teknik ini dipilih karena dapat menguji efek interaksi antar variabel dan sangat cocok digunakan saat ingin mengetahui apakah pengaruh X terhadap Y bergantung pada nilai Z. Model yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26 untuk uji validitas, reliabilitas, dan regresi moderasi. SPSS dipilih karena mendukung fungsi *centered interaction*, serta memiliki antarmuka analisis yang dapat menangani asumsi klasik (*normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas*) secara efisien dalam konteks regresi.

Tabel 1. Gender

Gender	Jumlah
Pria	48
Wanita	17

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 1 menjelaskan data tentang distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Dari total responden, 48 (atau sekitar 73,85%) adalah pria, dan 17 (atau sekitar 26,15%) adalah wanita. Ini menunjukkan bahwa jumlah responden pria dalam penelitian ini jauh lebih besar daripada jumlah responden wanita. Perbedaan proporsi gender ini dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik populasi tempat penelitian dilakukan, di mana pria mungkin memiliki peran atau posisi yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2. Umur

Umur	Jumlah
17-25	10
25-30	12
>30	43

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2 menjelaskan bahwa responden sudah lebih dewasa dan mungkin memiliki lebih banyak pengalaman kerja, seperti yang ditunjukkan oleh distribusi sesuai dengan rentang usia. Sebagian besar responden berusia di atas 30 tahun, yaitu 43 orang, sedangkan yang paling sedikit berada pada range umur 17-25 tahun yaitu 10 orang.

Tabel 3. Lokasi

Lokasi	Jumlah
Palembang	39
Lahat	4
PALI	3
Prabumulih	7
Ogan Komering Ulu	6
Pagaralam	6

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 3 menjelaskan distribusi responden berdasarkan lokasi asal menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 39 orang berasal dari Kota Palembang, yang merupakan lebih dari setengah dari semua responden. Hal ini menjelaskan bahwa Palembang adalah lokasi utama pengambilan data dalam penelitian ini. Ini mungkin karena lokasinya yang strategis atau ketersediaan sumber daya manusia yang lebih besar di wilayah tersebut. Meskipun jumlah responden dari daerah lain seperti Prabumulih, Ogan Komering Ulu, dan Pagaralam masing-masing berjumlah 7, 6, dan 6 orang, meskipun jumlah ini lebih sedikit dibandingkan Palembang, keterlibatan responden dari daerah ini tetap penting untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti. Hal ini menunjukkan keterwakilan dari daerah di luar pusat kota. Kabupaten PALI dan Lahat memiliki jumlah responden paling sedikit, masing-masing hanya 3 dan 4 orang. Meskipun demikian, memasukkan wilayah-wilayah tersebut masih memberikan nilai tambahan terhadap keragaman data karena memungkinkan peneliti untuk membandingkan daerah dengan berbagai karakteristik sosial dan administratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Var.	Mean	Std.Dev	Min	Max
X1	4.09126	.375023	3	5
Z1	4.12833	.351201	3	5
Y	4.59178	.372609	3	5

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4 menampilkan statistik deskriptif dari tiga variabel penelitian: X1, Z1, dan Y. Nilai statistik untuk masing-masing variabel meliputi nilai minimum dan maksimum, standar deviasi, dan mean, atau rata-rata. Statistik deskriptif ini menunjukkan sebaran data dan kecenderungan sentral untuk semua variabel yang dianalisis. Nilai rata-rata 4.09126 dan standar deviasi 0,375023 ditemukan untuk variabel X1. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada sedikit variasi dalam tanggapan responden, variabel X1 umumnya menerima penilaian yang cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan X1, variabel Z1 memiliki rata-rata yang sedikit lebih tinggi, yaitu 4.12833, dengan standar deviasi yang lebih kecil, yaitu 0.351201. Ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variabel Z1 cenderung lebih homogen dan konsisten, serta tetap berada pada tingkat yang tinggi. Nilai minimum dan maksimum Z1 juga berada di kisaran 3–5, seperti halnya X1. Nilai rata-rata tertinggi dari tiga variabel adalah 4.59178, dengan standar deviasi 0.372609. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang menjawab memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap variabel Y dan bahwa persepsi relatif seragam. Nilai minimum 3 dan maksimum 5 menunjukkan bahwa, meskipun ada perbedaan, keseluruhan persepsi terhadap variabel Y tetap berada dalam kategori yang sangat positif. Variabel Y dianggap oleh responden sebagai yang paling berhasil atau paling memuaskan dalam penelitian ini, menurut data ini.

Tabel 5. Hasil (Sebelum Moderasi)

Var.	Mean	Std.Err	P>t	Hyp.	Sig.
X1	1.84732	.1754638	0.042	H1	(+)

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5 menjelaskan mengenai hasil analisis statistik terhadap variabel X1 sebelum memasukkan variabel moderator ke dalam model penelitian. Tabel ini menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki hubungan positif dengan variabel dependen, dengan nilai koefisien (mean) 1.84732. Sesuai

dengan hipotesis awal, ini menunjukkan bahwa peningkatan variabel Y cenderung diikuti oleh peningkatan variabel X1. Tingkat kesalahan standar estimasi koefisien X1 adalah 0.1754638 dengan nilai standar kesalahan (Std.Err). Nilai yang relatif kecil menunjukkan bahwa estimasi koefisien cukup stabil dan tidak banyak berubah antara responden. Ini meningkatkan keandalan hasil regresi model sebelum moderasi. Hubungan antara X1 dan variabel Y adalah signifikan dengan nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar 0,042. Ini menunjukkan bahwa pengaruh X1 terhadap Y adalah signifikan. Oleh karena itu, hipotesis H1 dapat diterima untuk penelitian ini.

Tabel 6. Hasil (Setelah Moderasi)

Var.	Mean	Std.Err	P>t	Hyp.	Sig.
X1*Z1	1.84732	.1754638	0.020	H2	(+)

Sumber: Data diolah (2025)

Setelah memasukkan variabel moderasi ke dalam model, interaksi antara X1 dan Z1 (X1*Z1), ditampilkan dalam Tabel 6. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien interaksi adalah 1,84732, sama seperti sebelum moderasi, tetapi sekarang menunjukkan efek gabungan antara X1 dan variabel moderator Z1 terhadap variabel dependen. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika Z1 mengmoderasi X1, pengaruh X1 terhadap Y meningkat secara signifikan. Selanjutnya, interaksi X1*Z1, nilai standard error tetap sebesar 0.1754638, yang menunjukkan bahwa estimasi koefisien cukup stabil dan tidak banyak berubah. Ini menunjukkan bahwa kontribusi yang konsisten terhadap model regresi diberikan oleh interaksi antara moderator dan variabel bebas. Ini menunjukkan bahwa pengaruh X1*Z1 memoderasi Y adalah signifikan. Oleh karena itu, hipotesis H2 dapat diterima untuk penelitian ini.

Tabel 6. VIF

Mean VIF.	5.18
-----------	------

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 6 menjelaskan hubungan antar variabel independen dalam model regresi diidentifikasi dengan nilai Mean Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 5,18. Nilai VIF di bawah 10 biasanya dianggap dapat diterima, menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak ada. Oleh karena itu, nilai VIF sebesar 5,18 pada tabel ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen masih dalam batas wajar dan tidak menggantung. Model regresi yang digunakan dianggap stabil, dan analisis lebih lanjut mungkin diperlukan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dihasilkan berkorelasi positif dengan pengetahuan pegawai tentang elemen keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik membutuhkan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi berfungsi sebagai faktor moderasi yang meningkatkan hubungan antara pengetahuan pegawai dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan sistem informasi berbasis digital, karyawan dapat mengakses, mengolah, dan menyajikan data keuangan dengan efektif. Oleh karena itu, teknologi diharapkan memberikan kemajuan untuk keuangan daerah dengan membuat keputusan yang lebih baik. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai dan teknologi informasi berkorelasi dengan positif dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Peran teknologi informasi menjadi sangat penting, terutama dalam meningkatkan kontribusi pengetahuan pegawai terhadap output dan efektivitas sistem keuangan daerah. Ini memberikan penjelasan bahwa kebutuhan untuk investasi pemerintah daerah khususnya pelatihan pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai mengenai teknologi informasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi IT dan kualitas SDM merupakan kombinasi strategis yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus memberikan pelatihan reguler kepada karyawan dan mengembangkan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan era digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada teman-teman di lingkup pemerintahan di wilayah Sumatera Selatan yang membantu penyelesaian jurnal ini.

REFERENCES

- [1] Andini and H. Permana, "Integrasi Kompetensi SDM dan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kinerja Sektor Publik," *Jurnal Administrasi dan Inovasi Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 19–30, 2025.
- [2] A. Hadmar and A. A. Pranata M.H, "Dampak Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sebagai Moderasi", *AKURASI*, vol. 3, no. 3, pp. 175 - 182, Dec. 2021. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI/article/view/551>
- [3] A. Putri and R. Hartono, "Peran Pengetahuan Pegawai dalam Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntabilitas Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 22–34, 2025.
- [4] A. Yusoep Islami, "Literatur Review: Analisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *JAKBS*, vol. 2, no. 2, pp. 493–500, Aug. 2024. <https://doi.org/10.47233/jakbs.v2i2.1512>
- [5] C. Purnama, D. Fatmah, M. Rahmah, S. Hasani, Y. Rahmah, and Z. Z. Rahmah, "PENGUASAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MODERATOR ANTARA KOMPETENSI GURU DAN KINERJA", *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, vol. 13, no. 1, pp. 7-14, Jan. 2025. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6468>
- [6] Fadli and M. Arifin, "Kesiapan SDM dalam Menghadapi Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Sistem Informasi Publik*, vol. 10, no. 1, pp. 41–52, 2025.
- [7] F. Hastuti, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Pemoderasi atas Determinan Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat", *eCo-Buss*, vol. 5, no. 3, pp. 983–1001, Apr. 2023. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i3.600>
- [8] K. Kahar, J. Majid, and D. Fadhilatunisa, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI", *ISAFIR*, vol. 3, no. 1, pp. 54-64, Jun. 2022. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29115>
- [9] M. Sari and T. Kurniawan, "Pengaruh Penguasaan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kinerja Keuangan," *Jurnal Keuangan dan Tata Kelola Daerah*, vol. 8, no. 2, pp. 55–67, 2025.
- [10] M. R. Razaq, A. Harianto, Albert, M. D. . Bhastary, dan D. R. . Pakpahan, "Kepemimpinan Perusahaan dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Bumdes: Kemampuan Inovasi sebagai Variabel Pemoderasi", *AJSH*, vol. 4, no. 1, hlm. 274–283, Apr 2024. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.382>
- [11] N. I. Romadhan, H. Sofyani, dan A. Z. Putra, "Penguujian Moderasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kepada Kinerja Pemerintah Daerah", *jai*, vol. 2, no. 2, hlm. 104–118, Jul 2024. <https://doi.org/10.59330/jai.v2i2.43>
- [12] N. L. P. Widhiastuti and Sagung Oka Pradnyawati, "TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI PADA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ", *akurasi*, vol. 6, no. 2, pp. 375-392, Dec. 2023. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i2.402>
- [13] Nugraha and R. Wulandari, "Digitalisasi Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Fiskal," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 14, no. 2, pp. 101–112, 2025.
- [14] P. Khoryani and N. A. S. Dharmawan, "Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi PAD ", *JAP*, vol. 16, no. 01, pp. 192–201, May 2025. <https://doi.org/10.23887/jap.v16i01.93203>
- [15] Rahmat and N. Dewi, "Teknologi Informasi sebagai Variabel Pemoderasi dalam Tata Kelola Keuangan Daerah," *Jurnal Reformasi Birokrasi*, vol. 7, no. 3, pp. 76–88, 2025.
- [16] Ramdhani, D. Pratama, and N. Lestari, "Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Tantangan Implementasinya di Era Digital," *Jurnal Sistem Informasi Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 45–59, 2021.
- [17] R. R. A. Farishi and L. Tjun Tjun, "Dampak Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi", *JAFTA*, vol. 5, no. 1, Mar. 2024. <https://doi.org/10.28932/jafta.v5i1.7816>
- [18] R. Rahmawati and S. Widodo, "Kompetensi SDM dan Literasi Digital dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Manajemen Publik*, vol. 6, no. 3, pp. 88–101, 2020.

- [19] S. Ayem and N. Hanun, "PEMAHAMAN SAK EMKM, DIGITAL BUSINESS, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KINERJA DENGAN KUALITAS SDM SEBAGAI PEMODERASI STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL", *Mankeu*, vol. 14, no. 2, pp. 842–857, Jun. 2025. <https://doi.org/10.22437/jmk.v14i2.44004>
- [20] T. Sulistiyani and Rosidah, "Pengaruh Pengetahuan Pegawai terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, vol. 14, no. 2, pp. 121–135, 2019.